

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desentralisasi merupakan salah satu perwujudan dari pelaksanaan otonomi daerah, dimana tugas dan wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri pemerintahan dan kepentingan masyarakat didaerah diserahkan kepada pemerintah daerah. Tugas tersebut dilaksanakan pemerintah daerah dengan tetap berpedoman pada perundang-undangan yaitu undang-undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan undang-undang No. 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Daerah dan Pusat.

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan otonomi, daerah dituntut untuk lebih inovatif dan kreatif dalam merumuskan kebijakan pemerintah dan pengelolannya khususnya di bidang keuangan. Atas dasar pemikiran tersebut, pengelola pendapatan daerah harus mampu mengoptimalkan partisipasinya dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan belanja untuk kelangsungan pembiayaan penyelenggaraan pemerintah (Rahmayati, 2016).

Dalam mengelola pemerintahannya, daerah memerlukan penilaian untuk melihat apakah pengelolaan keuangan sudah dilakukan secara efisien dan efektif dengan cara menilai kinerja pengelolaan keuangan daerah. Penilaian kinerja tersebut dilakukan dengan rasio keuangan terhadap anggaran pendapatan dengan belanja (APBD) yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya. Penggunaan analisis rasio laporan keuangan sebagai alat analisis keuangan secara luas telah ditetapkan pada Lembaga organisasi yang

bersifat komersial. Adapun manfaat dari analisis rasio laporan keuangan pemerintah daerah adalah dapat diketahui kinerja pemerintah daerah yang bersangkutan dan juga dapat dipergunakan sebagai acuan agar dapat lebih meningkatkan kinerja dan juga pendapatan daerahnya pada periode-periode selanjutnya (Kurnati, 2012 dalam rahmawati dan Putra, 2016). Anggaran sebagai instrumen kebijakan pemerintah harus dapat menunjukkan kinerja yang baik.

Pengukuran kinerja keuangan penting dilakukan untuk dapat menilai akuntabilitas pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah dan dituangkan dalam bentuk laporan keuangan yang bertujuan untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran serta kinerja keuangan pemerintah daerah yang berguna dalam pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas pelaporan atas sumber daya yang dikelola pemerintah.

Kinerja keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan. Menurut Halim (2008) analisis keuangan adalah usaha mengidentifikasi jenis-jenis keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Dalam organisasi pemerintah untuk mengukur kinerja keuangan ada beberapa ukuran kinerja yaitu rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas, rasio efisien keuangan daerah, rasio keserasian belanja dan rasio pertumbuhan. Analisis terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah penting untuk menghasilkan informasi terutama untuk membuat kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah dan menilai apakah pemerintah daerah telah

berhasil mengelolah keuangannya dengan baik serta memberi dampak positif kesejahteraan masyarakat.

Menurut Indra Bastian (2001: 330) pengukuran kinerja adalah suatu cara yang digunakan manajemen dalam meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Menurut Mardiasmo (2009: 121) menyatakan bahwa pengukuran kinerja merupakan suatu cara yang digunakan untuk menilai tingkat pencapaian dari suatu kegiatan yang telah dilakukan baik melalui pengukuran keuangan maupun non keuangan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Ende sebagai salah satu entitas yang mengelolah keuangan masyarakat perlu mengelolah secara efektif, efesien dan ekonomis. Salah satu alat ukur yang digunakan untuk menganalisis kinerja keuangan di Kabupaten Ende adalah dengan memilih beberapa rasio seperti analisis rasio Pendapatan Daerah, analisis rasio Belanja Daerah dan analisis pembiayaan Daerah adapun dari bebarapa tahun terakhir dari 2018 -2020 kondisi realisasi dari setiap item baik dari pendapatan, belanja maupun pembiayaan beberapa permasalahan yang dihadapi Kabupaten Ende antara lain: (1) ketergantungan pemerintah daerah kepada subsidi dari pemerintah pusat yang tercermin dalam besarnya bantuan pemerintah pusat baik dari sudut anggaran rutin, yaitu subsidi daerah otonom maupun dari sudut anggran pemerintah daerah, (2) Rendahnya kemampuan daerah untuk menggali potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah yang tercermin dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang relatif kecil di banding total penerimaan

daerah lainnya, (3) kurangnya usaha dan kemampuan penerimaan daerah dalam mengelola dan menggali sumber-sumber pendapatan yang ada.

Berdasarkan fenomena dari sumber data siaran BPK perwakilan NTT menyatakan bahwa, Badan Pemeriksa keuangan (BPK) telah melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintahan Kabupaten Ende. Dari pemeriksaan tersebut BPK memberi opini masih terdapat beberapa permasalahan yang harus menjadi perhatian pemerintahan Kabupaten Ende yaitu antara lain pengelolaan insentif pemungutan pajak daerah yang tidak sesuai ketentuan, terdapat volume pekerjaan terpasang atas 13 paket pekerjaan pada empat organisasi perangkat daerah (OPD), pengelolaan belanja tak terduga untuk kegiatan jaring pengaman sosial belum sepenuhnya tertib, dan pengelolaan aset tetap pada pemerintahan kabuapten Ende juga belum sepenuhnya terib, Jadi dengan adanya masalah ini perlu adanya suatu perbaikan terhadap permasalahan terjadi sehingga bisa meningkatkan kualitas laporan keuangan yang lebih baik lagi

Berikut disajikan data laporan realisasi anggaran pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Daerah dan Penerimaan Pembiayaan Daerah pada pemerintahan Kabupaten Ende Tahun anggaran 2018-2020.

Tabel 1.1
Data laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Ende Tahun 2018-2020

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
2018	Rp 1.137.670.392.962	Rp 1.096.894.674.516
2019	Rp 1.276.961.797.235	Rp 1.257.657.079.977
2020	Rp 1.206.145.106.997	Rp 1.182.266.909.8.4

Sumber: Badan Pengelolah Keuangan Kabupaten Ende 2023

Tabel 1.2
Data Laporan Realisasi Belanja Pemerintahan Daerah Kabupaten Ende
Tahun 2018-2020

No	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2018	Rp 1.207.121.312.712	Rp 1.106.522.203.123
2	2019	Rp 1.333.858.712.191	Rp 1.228.575.722.775
3	2020	Rp 1.023.386.592.091	Rp 947.632.047.047

Sumber: Badan Pengelolah Keuangan Kabupaten Ende 2023

Tabel 1.3
Data Laporan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah Pemerintahan
Kabupaten Ende tahun 2018-2020

No	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2018	-	-
2	2019	-	-
3	2020	-	-

Sumber: Badan Pengelolah Keuangan Kabupaten Ende 2023

Berdasarkan ketiga tabel di atas menunjukkan bahwa anggaran pendapatan dari tahun 2018-2020 antara lain di tahun 2018 sebesar Rp 1.207.121.312.712 ditahun 2019 sebesar Rp 1.333.858.712.191 dan di tahun 2020 sebesar Rp 1.023.386.592.091 berbeda dengan realisasi pendapatan asli daerah dari tahun 2018-2020 yang mengalami fluktuasi.

Dapat dilihat juga dari tabel 1.2 menunjukkan bahwa data anggaran belanja daerah Kabupaten Ende dari tahun 2018-2020 antara lain 2018 sebesar Rp 1.207.121.312.712 tahun 2019 sebesar Rp 1.333.858.712.191 dan di tahun 2020 sebesar Rp 1.023.386.592.091 sama halnya juga dengan nilai realisasi belanja dari tahun 2018-2020 yang mengalami fluktuasi.

Berdasarkan data Laporan Realisasi Anggaran untuk Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah menunjukkan bahwa anggaran pendapatan yang dimiliki masih belum mampu untuk membiayai seluruh

kebutuhan operasional yang tersaji dalam bentuk jumlah belanja. Kondisi dari tiga tahun ini perlu diteliti lebih lanjut menggunakan analisis rasio untuk menilai kinerja keuangan Kabupaten Ende. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “**Analisis Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2018-2020**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

“Bagaimana Kinerja Keuangan Pemerintahan Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2018-2020 berdasarkan analisis Rasio Keuangan?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

“Mengetahui Kinerja Keuangan Pemerintahan Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2018-2020 berdasarkan analisis Rasio Keuangan”.

1.4 Manfaat penelitian

Berdasarkan penelitian di atas, manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Manfaat Praktis

Dengan Penelitian ini didapat sebagai sumber informasi atau dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dan masukan dalam upaya meningkatkan kinerja keuangan daerah Kabupaten Ende

2) Manfaat Teoritis

a) Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumbangan pemikiran tentang pentingnya menganalisis kinerja keuangan untuk memperbaiki dan sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan.

b) Bagi Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

Sebagai bahan referensi dan bacaan untuk pengembangan penelitian selanjutnya serta dapat meningkatkan referensi berbagai program Pendidikan di universitas katolik Widya Mandira Kupang.

c) Bagi Penulis

Untuk melatih ketajaman analisis dan meningkatkan ilmu pengetahuan serta dapat mengembangkan ilmu yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan.